

# Kontestasi *Frame* Surat Kabar Nasional dalam Liputan “Aksi Bela Islam”

## *Contest of National Newspaper Frame in Coverage of “Action to Defend Islam”*

Karman

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, Telepon: 021-3800418 Jakarta 10110

karm003@kominform.go.id

Diterima: 27 Januari 2017 || Revisi: 2 Mei 2017 || Disetujui: 11 Juli 2017

**Abstrak** – Tulisan ini membahas bagaimana surat kabar harian membingkai realitas aksi umat Islam. Aksi tersebut menarik pemberitaan media massa nasional dan internasional karena melibatkan muslim dalam jumlah besar, memiliki kompleksitas persoalan (hukum, politik, agama, dan kepentingan), yaitu kontestasi pemilihan gubernur Jakarta 2017. Media terlibat dalam kompleksitas tersebut dan digunakan sebagai instrumen, yaitu politik pemberitaan. Kajian ini bertujuan menemukan bingkai surat kabar harian nasional dengan melakukan analisis isi kualitatif terhadap surat kabar nasional, yaitu: *Kompas*, *Republika*, *Suara Pembaruan*, dan *Media Indonesia* selama periode November 2016. Dengan menganalisis tajuk rencana mereka, kajian menemukan bahwa *frame* surat kabar di Indonesia berbeda satu sama lain. *Frame* surat kabar *Republika* dan *Suara Pembaruan* bahkan saling bertentangan. *Republika* menganggap aksi umat Islam sebagai respon untuk memperoleh keadilan dan hak asasi karena penistaan agama mereka (masalah hukum). *Suara Pembaruan* melihat aksi sebagai masalah politik (pemilihan gubernur DKI Jakarta) yang menggunakan isu agama. *Media Indonesia* melihat aksi juga sebagai masalah politik. *Kompas* melihat aksi sebagai persoalan agama dan politik. Kajian menyimpulkan bahwa walaupun diharapkan tidak memihak sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi, media massa tetap saja memihak dalam isu yang krusial seperti agama. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa media umum sekalipun bisa menjadi media partisan pada konteks tertentu.

**Kata Kunci:** aksi bela Islam, analisis isi kualitatif, *frame*, surat kabar nasional

**Abstract** – This article deals with how daily newspapers of Indonesia frame reality of the collective action of Muslims. That action becomes a magnet for national and international mass media because involving a large number of Muslim, and has a problem complexity (legal, politic, religion) and political interests (contestation for Jakarta governor). The media gets involved in that complexity because they are harnessed as a political instrument, by conducting framing. This study aims to find daily newspaper frame by analyzing the content qualitatively. Those newspapers are *Kompas*, *Republika*, *Suara pembaruan*, and *Media Indonesia* during November 2016. By analyzing their editorials, we find that their frames regarding Muslim collective action are different to each other. Even, frames of *Republika* and *Suara Pembaruan* are contested. *Republika* regards the Muslim action as a respond to get justice and basic right because of their religion blasphemy. *Republika* considers it as a legal issue. *Suara Pembaruan* views the Muslim action as a political issue (governor election of DKI Jakarta), which makes use of religion issue. *Media Indonesia* sees the action as a political issue as well. *Kompas* regards it as political and religion issue. We conclude that although expected to be impartial – as part of democratic values, mass media keep in-partiality in crucial issues e.g., religion. This study gives our understanding that mass media can be partial in the certain contexts.

**Keywords:** action to defend Islam, frame, national newspapers, qualitative content analysis

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, menjamin terlaksananya nilai-nilai demokrasi. Salah satunya adalah kebebasan berkeyakinan. Jaminan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28E ayat 1 termaktub: “...setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Kebebasan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogatory*). Pasal 29 menyebutkan jaminan

negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu, warga negara Indonesia perlu mengembangkan sikap toleransi dan sensitifitas terhadap potensi konflik yang muncul dari fenomena kebhinekaan seperti suku, agama, ras, golongan, afiliasi politik, dan sebagainya.

Pidato gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang terkenal dengan Ahok di Kepulauan

Seribu pada 27 September 2016 yang menyinggung Al-Quran Surat Al-Maidah: 51 menunjukkan ketidaksensitifan terhadap umat Islam dengan menggunakan kalimat berikut ini:

“...dibohongin *pake* surat Al-Maidah 51. Jadi, Bapak-Ibu perasaan *gak* bisa pilih *nih* karena 'saya takut masuk neraka'...dibodohi” (Channel Berita Terkini, 2016).

Penulis sengaja menggunakan kata ‘tidak sensitif’ untuk terhindar dari perdebatan penodaan ataukah tidak. Ketidaksensitifan ini tercermin dari penggunaan kata “*dibohongin*” dan “*dibodohi*”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai itu sebagai penodaan terhadap Al-Quran dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam (MUI, 2017). MUI mendapat dukungan dari gerakan nasional pengawal fatwa (GNPF) yang melakukan rangkaian aksi pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016 (aksi 411), dan 2 Desember 2016 (aksi 212). Peserta aksi terdiri atas organisasi massa pergerakan Islam, lembaga pendidikan, elemen pelajar dan mahasiswa, dewan keluarga masjid, kelompok majelis *ta'lim* atau pengajian, pondok pesantren (dilaporkan oleh GNPF, 2017).

Peristiwa tersebut mendapat liputan dan respon dari media massa, baik media cetak, elektronik, maupun internet. Banyak penelitian berhasil membuktikan bahwa media memaknai realitas atau fenomena sosial secara berbeda sesuai dengan skema interpretasi, ideologi, dan konteks mereka. Perbedaan pemaknaan atau pendefinisian suatu peristiwa ini berimplikasi pada perbedaan pada aspek lain, seperti perbedaan penyebab masalah, solusi atas masalah (Alper, 2014; Entman, 2007; Hanson, 1995; Papacharissi, Zizi., Oliveira, 2008; Yang & Ishak, 2012).

Tulisan ini membahas mengenai bagaimana media massa membingkai realitas Aksi Bela Islam (selanjutnya disebut aksi). Kajian ini bertujuan menemukan bingkai (*frame*) yang muncul di media massa dalam menyikapi aksi tersebut. *Frame* yang dimaksud mencakup bagaimana media massa melakukan identifikasi masalah, menginterpretasikan akar penyebab masalah, apa argumen media, dan rekomendasi apa yang diajukan oleh media.

Kajian ini berusaha berkontribusi dalam upaya membangun literasi informasi. Literasi dimaksud adalah kemampuan menganalisis dan mengevaluasi bahwa media bukan yang menyampaikan realitas yang objektif melainkan realitas yang subjektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa media massa yang seharusnya

-secara normatif- menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan Negara, namun pada praktiknya media menjadi terbelah seperti yang ditunjukkan bagaimana mereka melakukan *framing*. Penyebabnya adalah keberpihakan media pada satu masalah berdasarkan afiliasi ikatan psikologis (etnis, agama). Ada kesenjangan, bagaimana media seharusnya dan bagaimana faktanya.

Informasi yang terus bertambah secara kuantitas perlu diimbangi dengan kemampuan analisis informasi, tidak hanya mendapatkannya (*retrieving*). Informasi yang tersebar di media bersifat kontekstual dan sarat dengan relasi dengan aspek lain (*interplay*). Literasi informasi seperti ini diperlukan tidak sekedar literasi media yaitu bagaimana menggunakan media.

Fenomena *frame* media dapat dijelaskan dengan Teori *Framing* yang umum diterapkan dalam penelitian bidang ilmu komunikasi atau kajian media (Maher, 2001) untuk menggambarkan kekuatan teks komunikasi (Entman, 1993, p. 51). Efek *framing* terjadi dalam hal penggambaran peristiwa tertentu. Individu menekankan pada aspek tertentu yang menyebabkan orang lain juga memberikan perhatian pada masalah itu (Matthes, 2012). Penerapan *framing* tidak eksklusif bagi ilmu komunikasi saja karena *framing* bertitik tolak dari perspektif ilmu psikologi kognitif dan antropologi (Yang & Ishak, 2012).

*Framing* adalah proses penyeleksian dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas agar lebih menarik perhatian, dianggap lebih bermakna, dan dapat diingat. Realitas begitu kompleks sehingga untuk memahaminya perlu disederhanakan dalam kategori tertentu. *Framing* merupakan prinsip seleksi, penekanan, presentasi apa yang ada dan terjadi, dan lain-lain (Durham, 1998; Entman, 1993; Gitlin, 1980; Hanson, 1995).

*Framing* bertujuan mempromosikan definisi masalah tertentu, evaluasi moral, interpretasi tentang faktor penyebabnya, dan rekomendasinya. Ini dinyatakan dalam artikel berjudul “*Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*”. Berikut kutipannya.

*Select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described* (Entman, 1993).

*Framing* mengandung empat elemen, yaitu: (1) identifikasi atau pendefinisian masalah (*problem*

*identification or define problems*); (2) diagnosis dan interpretasi penyebab masalah (*causal interpretation and diagnose causes*); (3) evaluasi moral (*moral evaluation or moral judgement*); (4) rekomendasi atau solusi yang diusulkan. Definisi Entman ini cocok untuk menganalisis pesan tekstual, terutama dalam berita, dan menghubungkan *frame* berita, kausal interpretasi, penilaian nilai, dan rekomendasi kebijakan terkait dengan pemberitaan (lihat Papacharissi, Zizi., Oliveira, 2008).

Identifikasi masalah merupakan bingkai utama yang menekankan bagaimana suatu peristiwa dipahami atau didefinisikan. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. *Diagnose causes* digunakan untuk mbingkai siapa/apa aktor dari suatu peristiwa atau yang menjadi sumber masalah. Karena masalah dipahami secara berbeda-beda, penyebab masalah pun dipahami secara berbeda pula.

*Moral evaluation* dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumen pada pendefinisian suatu peristiwa atau masalah yang dibuat. Pendefinisian atau diagnosa peristiwa dan masalah memerlukan argumentasi untuk mendukungnya. *Treatment recommendation* dipakai untuk menilai peristiwa atau apa yang dikehendaki media untuk menyelesaikan masalah tadi. Penyelesaian ini bergantung pada ketiga *frame* sebelumnya (Entman, 1993).

Berita yang menyampaikan *frame* antara lain adalah tajuk rencana, *kickers*, subjudul, fotografi, *caption foto*, teras berita (*leads*). Empat dimensi yang dikaji dalam kajian *framing* adalah: (1) presentasi berita (ukuran dan teknik penempatan); (2) topik berita (isu apa yang dicakup dalam *frame* berita); (3) atribut kognitif (aspek spesifik atau detail); dan (4) atribut afektif, seperti *tone* gambar (Tankard, 2008; Wong, 2004).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Analisis isi merupakan metode yang berpusat pada media (Macnamara, 2006), diperkenalkan kali pertama oleh Lasswell (1927) untuk mengkaji propaganda (lihat Rogers, 1994). *Content analysis* bisa bersifat induktif dan deduktif; kualitatif dan kuantitatif (Elo & Kyngäs, 2008; Marying, 2000) untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman atas fenomena (Hsieh, 2005). Banyak pengkaji media yang membahas masalah *qualitative content analysis* ini, antara lain Smith (2000), Marying (2000), Graneheim & Lundman (2004), Hsieh (2005), Forman dan

Damschroder (2007), Elo dan Kyngäs (2008), Zhang & Wildemuth (2009), Schreier (2014).

Analisis isi kualitatif adalah teknik sistematis dan dapat direplikasi untuk menyederhanakan kata-kata dalam teks menjadi beberapa kategori berdasarkan aturan koding yang jelas (lihat Stemler, 2001; Zhang & Wildemuth, 2009). Analisis isi kualitatif menggunakan pendekatan yang bersifat *directed approach* sehingga lebih terstruktur ketimbang pendekatan konvensional (kuantitatif).

Peneliti dapat menggunakan teori atau riset sebelumnya untuk mengidentifikasi konsep kunci atau variabel sebagai kategori koding awal (lihat Hsieh, 2005).

Penelitian ini menggunakan konsep *framing* Entman yang mengandung empat elemen: *problem identification, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation* (1993). Elemen *framing* tersebut sebagai kategori atau aturan koding analisis isi kualitatif ini.

Elemen ini sesuai dengan struktur unit analisis yang dikaji (tajuk rencana), yang memiliki struktur (1) pendahuluan - berisi pernyataan masalah, (2) tubuh - mengekspresikan pendapat media, (3) solusi - menawarkan solusi atas masalah, dan (4) kesimpulan - menekankan isu utama ("*Structure of an editorial*," 2017). Analisis isi kualitatif bersifat interpretatif-subjektif melalui klasifikasi bagian artikel dalam proses koding dan identifikasi tema ataupun pola sesuai elemen *framing* (lihat Hsieh, 2005).

Objek penelitian ini adalah harian *Kompas*, *Republika*, *Suara Pembaruan* (selanjutnya disingkat *SP*), dan *Media Indonesia* (selanjutnya disingkat *MI*). Alasan pemilihan media tersebut adalah karena koran tersebut adalah koran nasional yang memberitakan masalah aksi bela Islam. Pemberitaan tentang unjuk rasa menjadi *top issue* pada periode 1 September - 14 Desember 2016 dengan titik kulminasi pada bulan November 2016.

Unit analisis adalah tajuk rencana bulan November 2016. Tajuk rencana adalah artikel yang menyampaikan pendapat media terhadap aksi bela Islam. Isu yang menjadi konteks kajian ini memang terjadi pada tanggal 4 November 2016, tapi respon media terjadi selama November 2016. Koran-koran tersebut dipilih secara purposif dengan pertimbangan media tersebut adalah media nasional, intensif memberikan aksi bela Islam, serta merepresentasikan segmen masyarakat tertentu, dimiliki *media group* yang berbeda, afiliasi politik yang berbeda. Media

tersebut memberitakan dan memberikan sikap atas aksi bela Islam melalui tajuk rencana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut disajikan hasil penelitian, yaitu *frame* Koran *Kompas*, *Republika*, *Suara Pembaruan*.

### **Kompas: Aksi Tidak Berjalan Sesuai Aturan**

*Kompas* mem-*frame* aksi sebagai aksi yang tidak sesuai aturan. Ia menyikapi aksi dalam dua tajuk rencana: “*Biarlah Hukum Bicara*” (5 November 2016), dan “*Tetaplah di Jalur Hukum*” (17 November 2016). Kedua tajuk rencana itu memunculkan *frame* pengunjung rasa yang tidak sesuai aturan hukum, pemerintah yang akomodatif, dan Ahok yang dikorbankan dan dirugikan. Ini dibuktikan dengan bagaimana *Kompas* menonjolkan aksi yang berakhir dengan kericuhan. Ahok bukan sebagai penyebab aksi. *Kompas* menulis:

“Basuki dituduh melakukan penistaan agama dalam pidatonya di Pulau Seribu” (Harian *Kompas*, 2016a).

Masalah diidentifikasi muncul setelah video yang sudah diedit seseorang itu diunggah di media sosial dan menjadi *viral* (Harian *Kompas*, 2016a). Penyebab (*causal interpretation*) kericuhan adalah pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan undang-undang tentang penyampaian pendapat di muka umum yang membatasi unjuk rasa hingga pukul 18.00. Sepanjang pagi hingga perwakilan pengunjung rasa diterima Wakil Presiden (Muhammad Jusuf Kalla), unjuk rasa berjalan damai (lihat Harian *Kompas*, 2016a).

*Kompas* menilai pemerintah akomodatif terhadap pengunjung rasa. *Kompas* memerciki sikap pemerintah yang akomodatif seperti ditunjukkan dengan (1) menemui pengunjung rasa; (2) mengakomodasi tuntutan pengunjung rasa (penegakan hukum secara cepat dan tegas terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif -Basuki Tjahaja Purnama- atas dugaan penistaan agama; (3) mengadakan pertemuan dengan pemimpin organisasi massa Islam di Istana pada 1 November 2016 dan menegaskan akan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama melalui proses hukum (seperti dilaporkan dalam tajuk berjudul “*Biarlah Hukum Bicara*,” 2016), (4) meningkatkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan, dan penetapan sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama. Ini dinilai sejalan dengan aspirasi pengunjung rasa 4 November 2016 sekaligus membenarkan beberapa kali pernyataan

Presiden Joko Widodo yang menyatakan, “*Tidak akan melindungi Basuki*” (lihat Harian *Kompas*, 2016b).

*Kompas* merekomendasikan agar: (1) elit politik dan tokoh agama menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, bukan sekadar kepentingan kelompok atau politik; (2) mendorong penyelesaian jalur hukum (Harian *Kompas*, 2016a). Proses hukum terhadap Basuki hendaknya tetap berjalan dalam koridor hukum demi tegaknya supremasi hukum.

“Proses hukum terhadap Basuki hendaknya tetap berjalan dalam koridor hukum demi tegaknya supremasi hukum. Biarlah polisi menyidik, jaksa menuntut, pembela membela, dan hakim memutuskan apakah Basuki terbukti menista agama atau tidak. Dalam negara demokrasi konstitusional, panggung peradilannya yang punya otoritas menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah” (Harian *Kompas*, 2016b).

### **Republika: Aksi Adalah Perjuangan Umat Islam Untuk Keadilan**

*Republika* memaknai aksi 411 sebagai perjuangan umat Islam untuk keadilan. Ini didukung oleh data berupa sikap *Republika* dalam tajuknya yang memandang aksi sebagai upaya memperoleh keadilan, hak asasi yang dijamin konstitusi dan harus dihormati. *Republika* menulis:

“Yang penting, aksi demonstrasi berjalan tertib. *Republika* yakin umat Islam bersikap dewasa, bisa menciptakan ketertiban. Aksi terjadi sebagai respon umat Islam karena agamanya dinistakan. Sementara itu, aparat penegak hukum lambat dalam menangani masalah ini. Kasus dugaan penistaan agama adalah murni masalah hukum (Harian *Republika*, 2016a).

Aksi dibingkai sebagai aksi yang bermartabat karena bernuansa religius seperti dilakukan setelah sholat Jumat, sambil ber-*sholawat*, dalam nuansa *ukhuwah* (persaudaraan), serta nasionalisme seperti diberitakan dengan membawa bendera merah-putih.

*Republika* meminta aparat keamanan menindak tegas provokator atau perusuh yang memiliki tujuan di luar aspirasi damai (Harian *Republika*, 2016). Ulama, tokoh muslim, dan seluruh umat Islam sudah mempercayakan masalah ini ke aparat penegak hukum. Oleh karena itu, mereka harus profesional (Harian *Republika*, 2016).

### **Suara Pembaruan (SP): Aksi Adalah Tunggangan Aktor Politik**

*SP* mbingkai aksi sebagai tunggangan politik. *Frame* ini dinyatakan dalam beberapa tajuk rencana:

“Jaga Keamanan Jakarta”, “Tak Perlu Unjuk Rasa Susulan”, “Ungkap Kelompok Makar”, “Kontestasi Pilgub Tanpa Isu SARA”, “Jangan Biarkan Garuda Tercabik”, “Merayakan Kebhinekaan”, “Setelah Unjuk Rasa Giliran Hukum Bicara”.

*SP* menonjolkan dampak aksi yang menciptakan kekhawatiran warga. Aksi dipahami dalam konteks politik, yaitu pemilihan gubernur DKI Jakarta. Aktor politik menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk menjegal lawan politik. Rivalitas memperebutkan kursi gubernur DKI telah menyeret publik ke isu SARA.

Ahok ditonjolkan sebagai pejabat yang kooperatif dan *gentleman*. Ia datang ke kepolisian untuk klarifikasi dan meminta maaf bila ucapannya saat berbicara kepada warga di Kepulauan Seribu terkait surat Al-Maidah: 51 dianggap melukai umat Islam. Ahok juga telah memenuhi panggilan kepolisian untuk pemeriksaan (Harian Suara Pembaruan, 2016a).

Aksi diidentifikasi sebagai sumber masalah yang menyebabkan kekhawatiran warga, aksi demonstrasi yang digelar berujung rusuh (Harian Suara Pembaruan, 2016a). Pada tajuk yang lain dinyatakan, “...aksi ditanggapi kepentingan tertentu” (Harian Suara Pembaruan, 2016f). Bahkan *SP* menduga ada upaya melengserkan presiden. Aksi yang awalnya menyuarakan tuntutan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama diduga telah ditanggapi kelompok yang ingin melengserkan presiden (Harian Suara Pembaruan, 2016d).

Aksi sebagai tanggapan politik lawan Ahok dinyatakan kembali pada berita tajuk berjudul “Kontestasi Pilgub Tanpa Isu SARA”. Tajuk tersebut menyatakan:

“Kasus dugaan penistaan agama sudah ditanggapi oleh kepentingan para aktor politik, baik yang hendak memenangi pemilihan gubernur maupun yang hendak melakukan makar untuk mengganti Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara” (Harian Suara Pembaruan, 2016e).

Menurut *SP*, aksi disebabkan permainan para aktor atau elit politik yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Mereka melakukan politisasi dan menunggangi unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap Ahok (Harian Suara Pembaruan, 2016c). Tingkat popularitas dan elektabilitas Ahok yang tak tertandingi mendorong lawan-lawannya untuk menjegalnya. Mereka yang bersaing untuk memperebutkan kursi gubernur DKI menyeret publik ke isu SARA (Harian Suara Pembaruan, 2016b).

Argumen evaluasi moral *SP* bertitik tolak dari argumen penghormatan konstitusi, persatuan & kesatuan bangsa, pluralitas atau kebhinekaan. Menurut *SP* dalam tajuknya menyatakan:

“Penggunaan hukum yang berlaku dianggap sebagai penyelesaian paling tepat bila semua pihak yang berkepentingan dalam kasus ini menyadari bahwa mereka menginjak bumi pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (Harian Suara Pembaruan, 2016b).

Legitimasi moral *SP* adalah persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman adalah modal utama bangsa ini maju. Kebhinekaan adalah kekuatan. Perbedaan SARA merupakan realitas yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa (Harian Suara Pembaruan, 2016c). Untuk mendapatkan pemimpin yang baik di negara ini, *SP* mengajak untuk tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan peraturan tentang pemilihan umum, serta produk terkait lainnya. Konstitusi menegaskan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk jabatan publik (Harian Suara Pembaruan, 2016e).

*SP* merekomendasikan tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh agama agar memberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan dan penuh kedamaian kepada umat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap warga memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk dalam bentuk unjuk rasa tetapi itu harus dilakukan dengan cara demokratis dan tidak melanggar hukum, jangan sampai berujung anarki serta memecah belah persatuan dan kesatuan (Harian Suara Pembaruan, 2016a).

Para elit politik, tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh agama diharapkan terus mendorong warga agar menyerahkan kasus Ahok sepenuhnya kepada proses hukum. Polisi juga diharapkan memproses hukum semua pihak yang menghasut rakyat dengan menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik. Para elit bangsa juga wajib menjaga diri agar tidak memanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa dengan isu SARA (Harian Suara Pembaruan, 2016c).

Isu SARA hendaknya tidak dijadikan senjata para kontestan untuk mengalahkan lawannya. Ini membuat kontestasi politik menjadi tidak adil dan memicu disintegrasi bangsa (Harian Suara Pembaruan, 2016e). Edukasi hukum tanpa sentimen SARA perlu ditanamkan kepada seluruh elemen bangsa, terutama oleh para elit, penegak hukum, dan pemuka agama, jika

mengaku sebagai bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45 (Harian Media Indonesia, 2016d).

**Media Indonesia (MI): Aksi Adalah Bara dalam Pilkada**

MI menganggap aksi sebagai masalah yang menghadirkan ketakutan bagi masyarakat (Harian Media Indonesia, 2016a) dan membuat mereka waspada. Ia menekankan *frame* ini dengan memetaforakan aksi dengan kata "bara" yang ada di tengah perhelatan pilkada DKI Jakarta" (Harian Media Indonesia, 2016b).

MI nampaknya sangat paham bahwa aksi merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi. Ia tidak mendelegitimasi aksi tersebut, tapi mengasosiasikannya dengan aksi lain yang banyak mengalami kegagalan dan tidak sedikit berujung kekacauan (Harian Media Indonesia, 2016c). MI menyatakan:

"Sedamai, setertib, dan sekondusif apa pun, demonstrasi tetap mengganggu masyarakat (Harian Media Indonesia, 2016d).

MI menyangsikan bahwa di antara massa itu ada kelompok tertentu yang punya tujuan berbeda (Harian Media Indonesia, 2016f). MI mengatakan, Ahok sudah

diproses secara hukum. Kehendak para pengunjung rasa sudah tercapai (Harian Media Indonesia, 2016c). Tersirat, MI ingin menyampaikan pesan bahwa aksi tidak ada gunanya kecuali mengganggu ketertiban. MI mendiagnosis aksi sebagai sesuatu yang tidak perlu ada. Sebaliknya, demonstrasi damai justru telah ditunggangi aktor-aktor politik (Harian Media Indonesia, 2016e).

Argumen MI untuk mendukung *frame* tadi adalah dengan berasumsi bahwa masyarakat menginginkan demokrasi yang sejuk, mendinginkan suasana, jauh dari niat memecah belah, dan tetap menjaga esensi nasionalisme, dan kebangsaan di bumi Indonesia (Harian Media Indonesia, 2016a). Alasan yang diajukan oleh MI tersebut sebenarnya tidak bicara langsung tentang aksi. Alasan tersebut merupakan sesuatu yang pasti diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. MI mengatakan:

"walaupun mendapat jaminan undang-undang, unjuk rasa semestinya menghargai hak orang lain untuk menikmati ketertiban dan ketenteraman. Setertib apa pun, demonstrasi tetap memunculkan efek samping, paling tidak mengganggu publik karena digelar di ruang milik publik" (Harian Media Indonesia, 2016f).

**Tabel 1** Perbandingan *Frame* Surat Kabar Nasional dalam kasus "Aksi Bela Islam"

	Kompas	Republika	Suara Pembaruan	Media Indonesia
<b>Problem Identification</b>	masalah politik	masalah hukum	masalah politik	masalah politik
<b>Causal Interpretation</b>	Aksi akibat dari video hasil editan.	Aksi upaya memperoleh keadilan karena agama dinista	Aksi upaya jegal elektabilitas lawan (Ahok).	Aksi merupakan gangguan Pilkada dan masyarakat
<b>Moral Evaluation</b>	Aksi tidak perlu karena pemerintah sudah akomodatif terhadap pengunjung rasa	Aksi adalah HAM, konstitusional;	Aksi ditunggangi aktor politik; Pemerintah sudah akomodatif thd demonstran.	Aksi mengganggu hak orang lain mendapat ketertiban; Kehendak para pengunjung rasa sudah tercapai
<b>Treatment Recommendation</b>	Elite politik dan agama harus mengutamakan kepentingan bangsa; Solusi dgn jalur hukum	Aparat harus profesional dlm kasus penistaan agama; penyelesaian melalui hukum; Penguasa diminta aspiratif thd orang yg membela agamanya.	Masalah Ahok diselesaikan melalui hukum.	Penyelesaian melalui hukum.

MI menonjolkan argumentasi pada aspek kepentingan publik (*public interest*), yaitu ketertiban sosial. MI memberi rekomendasi untuk memercayakan penanganan dugaan penistaan agama kepada

kepolisian (Harian Media Indonesia, 2016b), dan mengawal penanganan kasus itu agar berjalan di rel yang benar. Kasus Ahok ialah perkara hukum yang mutlak diselesaikan semata di jalur hukum. Hanya di

tangan penegak hukum yang independen dan profesional bisa dipastikan bahwa Ahok tak dilindungi atau sebaliknya, tak dizalimi oleh siapa pun (Harian Media Indonesia, 2016d). Hukum harus ditempatkan sebagai panglima (Harian Media Indonesia, 2016e). Perbandingan *Frame* Surat Kabar Nasional dalam kasus "Aksi Bela Islam" dapat dilihat pada Tabel 1.

### Di Balik Kontestasi *Frame*

Perbedaan *frame* media di atas dihasilkan dari konteks produksi narasi berita yang dipengaruhi oleh ideologi institusi media. Kontestasi *MI* terjadi karena perbedaan struktur ekonomi politik media sehingga perspektif ekonomi politik media menjadi relevan sebagai pisau analisis. Perspektif ini menekankan pada efek ideologi media pada kepentingan yang berkuasa (McQuail, 2010). Penguasa di media adalah pemilik media itu sendiri. Kontestasi *frame* media mencerminkan kepentingan pemilik media (politik maupun ekonomi).

Ini jelas terlihat pada perbedaan *frame* antara *Republika* dan *SP*. Perbedaan tersebut menunjukkan apa yang disajikan media adalah kaleidoskop realitas yang dikonstruksi oleh struktur atau agen dalam institusi media, antara lain *media moghul*. Perbedaan *frame SP* dan *Republika* dapat dipahami dengan melihat *media moghul*-nya dan struktur institusi medianya.

*SP* adalah perusahaan media yang termasuk Grup Lippo yang memiliki juga *Jakarta Globe*, *Investor Daily*, *The Straits Times*, *Majalah Investor*, *Globe Asia*, *The Peak*, *Campus Asia*, *Student Globe*, *Kemang Buzz*, *Campus Life*, *Beritasatu TV*, *First media*, dan *beritasatu.com*. Perusahaan lainnya adalah: Siloam Hospital, Lippo Karawaci, Matahari Putra Prima (Matahari Dept. Store, Hypermart, dan lain-lain), Universitas Pelita Harapan (UPH), dan Bank National Nobu (Lim, 2011, 2012; Nugroho, Yanuar., 2012; Sudiby, Agus., Patria, 2013).

Pemimpin grup ini adalah James Tjahaja Riyady atau Li Bái, konglomerat besar di Indonesia, etnis Tionghoa, beragama Kristen (Suryadinata, 1995). Perannya di Grup Lippo antara lain mendirikan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan (UPH). Kepada *Majalah Fortune*, ia menceritakan bahwa ia pernah berhenti dari jaringan bisnis selama sekurang-kurangnya dua tahun untuk belajar *divinity* atau teologi Kristen. Ia meluncurkan *Christian Network in Indonesia* untuk meningkatkan spiritualitas dan moral negara Indonesia (Behar, 2001).

Konteks ini penting untuk mendapatkan pemahaman mengapa harian *SP* berpihak kepada Ahok. Antara Basuki Tjahaja Purnama dan dan James Tjahaja Riady memiliki kesamaan dari sisi etnis (Tionghoa), agama (Kristen). Dalam teori *homophily*, jaringan sosial tercipta karena adanya kesamaan, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, prestise, kelas sosial, kepemilikan, dan kependudukan dan lain-lain. (lihat Monge, Peter R., Contractor, 2003).

Ahok dan etnis China juga memiliki kepentingan bersama (*mutual-interest*) pada proyek reklamasi teluk Jakarta yang dikembangkan oleh Grup Agung Podomoro. Target pasar kawasan reklamasi ini adalah etnis China. Iklan perumahan tersebut disiarkan di China. Jadi, dukungan *SP* lebih berorientasi kepada kepentingan ekonomi dan ideologi pemilik media.

Sementara itu, *Republika* adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kelompok Muslim, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Berbagai aktor pemerintah dan aktivis masyarakat menyatu di ICMI. Ketuanya umum ketika itu B.J. Habibie. *Republika* dipandang sebagai pers yang mempunyai kecenderungan terhadap "politik aliran" (aspirasi umat Islam). Visi *Republika* adalah "*Modern, Moderat, Muslim, Kebangsaan, dan Kerakyatan*". Sedangkan misi *Republika* adalah sebagai koran masyarakat baru yang maju, cerdas, dan beradab (Mubarak, 2006).

Eratnya hubungan *Republika* dan ICMI memberikan konteks dalam memahami *Republika*. ICMI dulu bukanlah perkumpulan cendekiawan Muslim melainkan sebagai perhimpunan kekuatan politik Islam yang pada masa 70-an dan 90-an banyak dipinggirkan. Saat itu, ICMI memprakarsai pendirian (1) *Islamic centre*; (2) *Central Studies For Indonesian Strategies*; dan (3) *Republika* sebagai pengimbang pers non-Islam (Hamad, 2004).

Saat ini, saham *Republika* dipegang oleh Erick Tohir dan Adi Sasono (pengurus ICMI). Koran ini terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan *Majalah Golf Digest Indonesia*, *Majalah Parents Indonesia*, stasiun radio Jak FM, Gen FM, Delta FM, FeMale Radio, Prambors, Jak TV, dan Alif TV (Lim, 2011, 2012; Sudiby, Agus., Patria, 2013). Jadi, dapat dipahami mengapa *frame Republika* memiliki keberpihakan terhadap aspirasi umat Islam seperti aksi bela Islam.

Adapun pemberitaan *Kompas* tentang aksi menunjukkan usaha *Kompas* untuk terlihat netral. Ia menekankan pihak ketiga yang berperan sebagai pemicu konflik, yang memanipulasi rekaman video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Pihak ketiga itu melakukan perubahan (*editing*) video Ahok. *Kompas* menyangkan juga kericuhan. Sikap dan model pemberitaan *Kompas* ini dimetaforakan seperti “*kepiting*”.

Tokoh pers senior, Rosihan Anwar, memandang model pemberitaan *Kompas* sebagai jurnalisme *kepiting*: mencoba melangkah setapak demi setapak untuk mengetes seberapa jauh kekuasaan memberikan toleransi kebebasan pers yang ada. Jika aman, kaki *kepiting* bisa maju beberapa langkah. Jika kondisi tak memungkinkan, kaki *kepiting* bisa mundur beberapa langkah (Oetama, 2001).

Model *kepiting Kompas* ini terlihat dalam kasus pemberitaan aksi bela Islam. *Kompas* mendiagnosa penyebab aksi adalah pihak yang memanipulasi video rekaman pidato Ahok, yaitu Buni Yani. Konsekuensinya akan berbeda jika *Kompas* mengidentifikasi penyebab masalah adalah Ahok seperti sikap *Republika*, atau *SP* dan *MI* yang melihat aksi bela Islam sebagai sumber masalah.

*Frame Kompas* menghadapi salah satu dari dua kubu kekuatan politik yang tengah berkontestasi: (Ahok) atau umat Islam. Karena menetapkan pihak ketiga *Kompas* berada pada zona yang aman karena orang tersebut tidak memiliki kekuatan atau kapital politik yang berarti.

*MI* adalah harian yang dimiliki oleh *media group* di bawah Surya Paloh. Kelompok usaha media ini memiliki harian *MI*, *Lampung Post*, *Borneonews*, *tabloid Prioritas*. Media ini juga bergerak di industri televisi (Metro TV) (Lim, 2012; Sudibyo, Agus., Patria, 2013). Surya Paloh aktif di dunia politik. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Penasihat partai Golongan Karya, pendiri organisasi massa bernama Nasional Demokrat, ketua dewan pembina organisasi masyarakat Nasional Demokrat yang menjadi partai politik.

Partai Nasional Demokrat bersama Partai Hati Nurani, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golongan Karya, mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat alias Ahok-Djarot, nomor urut 2 pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Ahok-Djarot berkompetisi dengan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (nomor urut 1, didukung

Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanah Nasional) dan pasangan Anies Baswedan-Sandiago Uno (nomor urut 3, didukung partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera (Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, 2017). Jadi, dukungan *MI* lebih berorientasi kepada kepentingan politik pemilik media karena partai politik pemilik media (Nasional Demokrat) tergabung dalam koalisi mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam pilkada DKI Jakarta 2017.

Kontestasi *frame* media menunjukkan peran konteks *media mogul*, media bukan melihat terus menyimpulkan dan menulis, tetapi lebih sering terjadi adalah menyimpulkan atau sudah memiliki kecenderungan tertentu, kemudian melihat fakta lapangan dan menginterpretasikannya sesuai dengan skemata interpretasi media. Lipmann (1992) mengatakan, media bersifat subjektif, memilih fakta apa yang ingin dipilih dan membuang apa yang ingin dibuang.

Subjektivitas tercipta karena media sebagai instrumen ideologi pemilik media yang berimplikasi kepada pemaknaan masalah aksi. Media bukan ranah yang netral yang memperlakukan berbagai kepentingan dan pemaknaan secara seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengonstruksi realitas. Media tidak bekerja dalam ruang hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah media.

Realitas di media mengandung interpretasi pemilik media (Kieran, 1997). Kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus yang menunjukkan, media mentransmisi pesan tapi mengonstruksi realitas. Faktor yang berperan dalam konstruksi *frame* media adalah konteks sosial politik komunikator seperti afiliasi politik dan kepentingan ekonomi.

Persamaan keempat media tersebut adalah sama-sama mengusulkan penyelesaian melalui jalur hukum dengan penekanan yang berbeda. *SP* menekankan pula penyelesaian melalui jalur hukum untuk mereka (aktor politik) yang menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik. *SP* merepresentasikan Ahok sebagai orang yang taat dan mendukung penegakan hukum. *Republika* menekankan penegakan hukum atas penista agama. *Kompas* menekankan kepada pihak yang memanipulasi video rekaman pidato Ahok. *MI* menekankan hukum yang semestinya menjadi panglima.

Keempat media memiliki kesamaan usulan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum.

Kesamaan usulan tersebut dapat terjadi karena penegakan hukum merupakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi. Bahkan penegakan hukum merupakan esensi demokrasi atau demokrasi substansialis, demokrasi normatif-maksimalis (Meyer, 2002; Suyatno, 2004). Tidak ada perbedaan pendapat tentang pengedepanan jalur hukum karena ini adalah cara yang menjadi konsensus bersama dan keinginan bersama (*social desirability*).

*Frame* media yang terpengaruh oleh kepentingan fragmatis-politis pemilik media berimplikasi pada hilangnya kepentingan publik. Seharusnya, media mengedepankan aspek yang mendasar dari bangsa ini. Media berperan sebagai entitas yang mengajarkan dan meningkatkan pluralitas atau kebhinekaan. Pluralitas pada aspek agama dan budaya menjadi realitas sosial. Konsekuensi logisnya, komponen yang ada di masyarakat perlu mengembangkan sikap toleransi, mengasah sensitifitas kultural untuk mengantisipasi timbulnya konflik terbuka.

Namun, pemilik media mengontrol media dan menjadikannya sebagai instrumen politik praktis dalam pemilihan kepala daerah. Kontestasi *frame* mencerminkan kontestasi dan rivalitas dalam politik. Di saat yang sama, kepentingan publik menjadi terabaikan. Karakteristik seperti ini, bukanlah hal yang baru.

Kajian literatur yang dilakukan Mathhes menunjukkan, banyak orang yang menyayangkan dampak negatif dominasi media dalam urusan komunikasi politik yang dikenal dengan *mediatization*, aktor politik membuat *frame* agak mendapat liputan media yang kemudian memunculkan wacana yang didominasi oleh konflik yang disukai media, personalisasi, dan dramatisasi (Herman, Edward S., 2010; Matthes, 2012).

Kondisi media di Indonesia lebih dari sekedar mediatisasi politik, tapi media menjadi instrumen politik. Ada *interplay* antara teks media dengan struktur lembaga media karena media itu tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya dan masyarakat secara umum. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa dalam konteks politik, ketika media *moghol* menjadi pengurus partai politik dan ikut dalam kontestasi politik, media menunjukkan fenomena mediatisasi politik dan politisasi media. Media menjadi terintegrasi dengan institusi politik. Aktivitas institusi diciptakan sebagai hasil interaksi politik. Keduanya saling mendukung (Hjarvard, 2008).

Mediatisasi politik dan politisasi media berjalan secara tandem dan simultan (Hepp, Hjarvard, & Lundby, 2015). Konfigurasi koalisi partai politik yang diketuai oleh orang yang juga menjadi pemilik media menentukan *frame* media khususnya dalam relasi media dan realitas politik.

Dalam masalah agama, media umum pun bersifat partisan, melakukan politik pemberitaan atas dasar aliran tertentu. Media menjadi sarana pendukung kandidat politik tertentu. Isi media mencakup perilaku politik dari (1) para pendukung seperti media komunikasi publik; (2) jurnalis melalui produk atau cerita mereka; (3) perilaku para pemilih dalam menentukan politik (lihat D'Angelo, 2012).

Dalam konteks strategi politik, media membantu dalam aspek "bagaimana" mendapatkan kekuasaan. Caranya adalah dengan melakukan politisasi media. *Frame* media seperti *slant* ('mendukung', 'kritis' dan 'netral') dan bias memberikan pandangan mengenai bagaimana media memengaruhi distribusi kekuasaan (*power*): siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana (Entman, 2007).

## KESIMPULAN

Bingkai media massa dalam realitas aksi bela Islam bukan hanya berbeda tapi berkontestasi. Ada dua media yang jelas bertentangan, yaitu: *Republika* dan *SP*. Ini terlihat pada semua elemen *frame*. Terkait dengan *problem identification*, *Republika* menilai aksi adalah respon atau reaksi untuk memperoleh keadilan karena penistaan agama dan membela agamanya. Masalah dipahami sebagai masalah hukum murni, yaitu penistaan agama. Sementara itu, *SP* melihat aksi sebagai masalah politik. Aksi ditanggapi oleh aktor politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 2017.

Dari sisi *causal interpretation*, *Republika* melihat aksi disebabkan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. *SP* melihat aksi sebagai permainan aktor politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang menggunakan isu agama. Aktor dan elit politik berusaha ingin menjegal popularitas dan elektabilitas Ahok. Aksi ditanggapi juga oleh politisi dan kelompok radikal, dan orang-orang yang haus kekuasaan. *Republika* berargumen aksi terjadi sebagai upaya untuk memperoleh hak asasi manusia (kebebasan melaksanakan agama).

*Republika* mbingkai peran pemerintah (kepolisian) dengan menonjolkan lambatnya

penanganan dan penyelesaian masalah ini. Sebaliknya, *SP* menonjolkan sikap pemerintah yang akomodatif terhadap aspirasi dan tuntutan pengunjuk rasa. Semua tuntutan aksi dipenuhi oleh pemerintah.

*MI* melihat aksi dari konteks politik (pilkada). *MI* mbingkai aksi bela Islam sebagai sumber masalah, seperti menghadirkan ketakutan dan mengganggu masyarakat sedamai, setertib, dan sekondusif apapun demonstrasi.

Sementara itu, *Kompas* melihat aksi bukan hanya sebagai persoalan agama melainkan juga sebagai persoalan politik. *Kompas* lebih menyoroti aksi dari proses jalannya aksi yang berujung ricuh. *Kompas* berbeda dengan *SP* yang melihat aksi dari perspektif politik, atau *Republika* yang melihat hanya dari perspektif penistaan agama Islam (masalah hukum).

Penelitian memberikan satu pemahaman bahwa dampak *framing* media yang mampu menggambarkan realitas dan menonjolkan aspek tertentu dan mengesampingkan aspek yang tidak disukai. Khalayak perlu meningkatkan literasi agar menerima berita secara selektif dan kritis karena media adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Pesan media menjadi sarat muatan kepentingan (*vested interest*).

Dalam konteks *government public relations*, *framing* media ini dapat dimanfaatkan untuk menonjolkan, menekankan isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Cara para pemimpin menggunakan bahasa untuk mem-*frame* masyarakat, situasi, dan peristiwa memberikan konsekuensi penting terhadap cara individu memahami dunia dan aksi mereka (Fairhurst, 2011). Bahasa (baca: *frame*) adalah struktur-yang-menstruktur (*structuring structures*), *modus operandi* (Bourdieu, 1991).

Implikasi sosial penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan sensitifitas kultural. Kasus ini terjadi karena (pertama) pidato gubernur DKI Jakarta yang tidak bisa memperkirakan potensi yang akan ditimbulkannya. Kedua, pengelola situs resmi pemerintah provinsi DKI Jakarta seharusnya selektif dan peka terhadap potensi konflik di tambah (ketiga) ada pihak yang mengambil keuntungan dari kejadian ini dengan menjadikan konflik sebagai ajang meningkatkan popularitas, elektabilitas kandidat politik di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Mereka mengesampingkan kepentingan bersama.

Di Indonesia, isu SARA merupakan isu yang rawan menciptakan konflik besar seperti terjadi pada konflik Ambon, dsb. Seharusnya, pemimpin atau tokoh masyarakat memberikan model yang baik untuk

menciptakan kerukunan. Kegagalan kepemimpinan memperparah konflik agama dan membawa negara dalam situasi konflik (Njoku & Hamid, 2014). Jika pemimpin yang gagal saja dapat memperparah konflik agama, apalagi pemimpin satu wilayah yang menjadi penyebab konflik agama.

Terkait dengan isu SARA, pemerintah menempatkan isu tersebut dalam kategori konten negatif. Karena konten negatif marak di internet, kementerian komunikasi dan informatika membuat regulasi tentang konten negatif. Konten tersebut adalah privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras, dan antargolongan; dan/atau muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas.

Tujuan regulasi ini adalah (pertama) memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan (kedua) melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan (Menkominfo, 2014).

Implikasi akademis. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji bagaimana pembentukan *frame*. Misalnya, mengkaji bagaimana kontribusi jurnalis dalam pembentukan *frame* berita, konteks seperti apakah yang berkontribusi terhadap pembentukan *frame* jurnalis terhadap *frame* media, bagaimana *frame* atau ideologi jurnalis berdialog dalam media yang ada di bawah kontrol *moghul*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, dan tim pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atas bantuan keuangan untuk perkuliahan. Kepada Prof. Sasa Djuarsa Sendjaya, Ph.D yang sempat mengajarkan teori-teori komunikasi massa untuk terakhir kalinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alper, M. (2014). War on Instagram: Framing conflict photojournalism with mobile photography apps. *New Media & Society*, 16(8), 1233–1248. <https://doi.org/10.1177/1461444813504265>
- Behar, R. (2001). The Year of Laying Cable Dangerously Two men from opposite worlds, both caught in the Clinton scandals, forge a troubled partnership in Jakarta. Retrieved December 18, 2016, from [archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune\\_archive/2001/07/23/307376/index.htm](http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/07/23/307376/index.htm)

- m?iid=sr-link1.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. (M. Raymond, Gino., Adamson, Ed.) (1st ed.). Cambridge-UK: Polity Press.
- Channel Berita Terkini. (2016). Ini Pidato Lengkap Ahok di Kepulauan Seribu Yang Menyinggung Ayat Al Maidah 51. Indonesia.
- D'Angelo, P. (2012). Studying Framing in Political Communication with an Integrative Approach. *American Behavioral Scientist*, 56(3), 353–364. <https://doi.org/10.1177/0002764211426332>
- Durham, F. S. (1998). News frames as social narratives: TWA flight 800. , 48(4), 100–117. *Journal of Communication*, 48(4), 100–117. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1998.tb02772.x>.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Entman, R. M. (2007). Framing bias: Media in the distribution of power. *Journal of Communication*, 57(1), 163–173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x>
- Fairhurst, G. T. (2011). Leadership and the power of framing. *Executive Forum*, (Summer), 43–48. <https://doi.org/10.1002/ltl.479>
- Forman, J., & Damschroder, L. (2007). Qualitative Content Analysis. *Advances in Bioethics*. [https://doi.org/10.1016/S1479-3709\(07\)11003-7](https://doi.org/10.1016/S1479-3709(07)11003-7)
- Gitlin, T. (1980). *The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left*. California: University of California Press.
- GNPF. (2017). Anak-Anak dan Aksi 212.
- Graneheim, U. ., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Education Today*, 24(2), 105–112. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001>
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik* (1st ed.). Jakarta: Granit.
- Hanson, E. C. (1995). Framing The World News: The Times of India in Changing Times. *Political Communication*, 12(4), 371–393. <https://doi.org/10.1080/10584609.1995.9963085>.
- Harian Kompas. (2016a, November 5). Biarlah Hukum Bicara.
- Harian Kompas. (2016b, November 17). Tetaplah di Jalur Hukum.
- Harian Media Indonesia. (2016a, November 1). Persatuan Bangsa Lebih Penting.
- Harian Media Indonesia. (2016b, November 2). Kepada Hukum Kita Berserah.
- Harian Media Indonesia. (2016c, November 3). Menyoal Urgensi Demonstrasi.
- Harian Media Indonesia. (2016d, November 5). Setelah Unjuk Rasa Giliran Hukum Bicara.
- Harian Media Indonesia. (2016e, November 7). Penegakan Hukum untuk Semua.
- Harian Media Indonesia. (2016f, November 28). Ancaman IS.
- Harian Republika. (2016, November 4). Tenang dan Jaga Persatuan.
- Harian Republika. (2016, November 5). Aksi Damai Bermartabat.
- Harian Republika. (2016, November 7). Tegakkan Hukum Untuk Semua.
- Harian Suara Pembaruan. (2016a, November 3). Jaga Keamanan Jakarta.
- Harian Suara Pembaruan. (2016b, November 7). Jangan Biarkan Garuda Tercabik.
- Harian Suara Pembaruan. (2016c, November 21). Merayakan Kebhinekaan.
- Harian Suara Pembaruan. (2016d, November 21). Ungkap Kelompok Makar.
- Harian Suara Pembaruan. (2016e, November 22). Kontestasi Pilgub Tanpa Isu SARA.
- Harian Suara Pembaruan. (2016f, November 22). Tak Perlu Unjuk Rasa Susulan.
- Hepp, A., Hjarvard, S., & Lundby, K. (2015). Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society. *Media, Culture and Society*, 1–11. <https://doi.org/10.1177/0163443715573835>
- Herman, Edward S., and N. C. (2010). *Manufacturing Consent: The Political Economy of The Mass Media*. London: Random House.
- Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Society. *Nordicom Review*, 29, 105–134. <https://doi.org/10.4324/9780203155363>
- Hsieh, H.-F. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Kieran, M. (1997). New reporting and the ideological presumption. *Journal of Communication*, 47, 79–96. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1997.tb02707.x>
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. (2017). Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Retrieved January 4, 2017, from <http://kpujakarta.go.id>
- Lim, M. (2011). *Democratization & Corporatization of Media In Indonesia*. Arizona: Participatory Media Lab.
- Lim, M. (2012). *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Tempe-Arizona.
- Lippman, W. (1992). Stereotypes, Public Opinion, and The Press. In E. D. Cohen (Ed.), *Philosophical Issues In Journalism*. New York: Oxford University Press.
- Macnamara, J. (2006). Media Content Analysis: Its Uses; Benefits and Best Practice Methodology. *Asia Pacific Public Relations Journal*, 6(1), 1–34. <https://doi.org/10.4249/scholarpedia.3712>
- Maher, T. M. (2001). Framing: An emerging paradigm or a phase of agenda setting. *Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World*, 83–94.
- Marying, P. (2000). Qualitative Content Analysis. *Forum Qualitative Research*, 1(2), 10. [https://doi.org/10.1016/S1479-3709\(07\)11003-7](https://doi.org/10.1016/S1479-3709(07)11003-7)
- Matthes, J. (2012). Framing Politics: An Integrative Approach. *American Behavioral Scientist*, 56(3), 247–259. <https://doi.org/10.1177/0002764211426324>

- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publication Ltd.
- Menkominfo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (2014). Jakarta.
- Meyer, T. (2002). *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*. Jakarta: D’print Communication.
- Monge, Peter R., Contractor, N. S. (2003). *Theories of Communication Networks*. New York: Oxford University Press.
- Mubarok. (2006). *Analisis Sikap Media Dalam Pemberitaan Sengketa Blok Ambalat (Analisis Framing Harian Kompas dan Republika)*. Universitas Diponegoro.
- MUI. (2017). Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama.
- Njoku, C. C., & Hamid, H. A. (2014). Religion in a secular state and state religion in practice: Assessing religious influence, tolerance, and national stability in Nigeria and Malaysia. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 13(39), 203–235. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085347>
- Nugroho, Yanuar., dkk. (2012). *Mapping the landscape of the media industry In contemporary Indonesia*. Jakarta.
- Oetama, J. (2001). Memperbincangkan Etika Bisnis. In J. Pour (Ed.), *Dunia Usaha dan Etika Bisnis*. Jakarta: Kompas.
- Papacharissi, Zizi., Oliveira, M. de F. (2008). News Frames Terrorism: A Comparative Analysis of Frames Employed in Terrorism Coverage in U.S. and U.K. Newspapers. *The International Journal of Press & Politics*, 13(1), 52–74. <https://doi.org/10.1177/1940161207312676>
- Rogers, E. M. (1994). *History of Communication Study: Biographical Approach*. New York: Free Press.
- Schreier, M. (2014). Qualitative Content Analysis. In *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis* (pp. 170–183). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Smith, C. P. (2000). Content Analysis and Narrative Analysis. *Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology*. <https://doi.org/10.1093/acprof>
- Stemler, S. (2001). An overview of Content Analysis. Retrieved December 17, 2016, from <http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=17>
- Structure of an editorial. (2017).
- Sudibyo, Agus., Patria, N. (2013). The Television Industry in Post-authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(2), 257–275. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757434>.
- Suryadinata, L. (1995). *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches* (4th ed.). Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Suyatno. (2004). *Menjelajah Demokrasi*. Yogyakarta: Liebe Book.
- Tankard, J. (2008). The empirical approach to the study of media framing. In G. Reese SD, Gandy OH (Ed.), *Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World* (pp. 95–105). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Wong, K. (2004). Asian-Based Development Journalism and Political Elections Press Coverage of the 1999 General Elections in Malaysia. *Gazette: The International Journal for Communication Studies*, 66(1), 25–40. <https://doi.org/10.1177/0016549204039940>
- Yang, L. F., & Ishak, S. A. (2012). Framing interethnic conflict in Malaysia: A comparative analysis of newspaper coverage on the Hindu Rights Action Force (Hindraf). *International Journal of Communication*, 6(1), 166–189. <https://doi.org/10.1177/1468796813482310>
- Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative Analysis of Content. *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science*, 421. <https://doi.org/10.1002/hbm.20661>